

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke

Suryahman Purba¹, Hubertus Oja², Nur Jalal³

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus

²Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial, Universitas Musamus

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musamus

Email : suryahmanpurba@gmail.com

Received: 15-07-2026

Accepted: 17-08-2026

Published: 15-09-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke dalam mendukung transformasi digital. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubbag, Ketua KIM tingkat distrik dan kampung, serta masyarakat penerima manfaat. Penetapan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan program KIM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan strategi telah dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, dan penyusunan program pembinaan, namun belum didukung pemetaan kapasitas digital yang komprehensif. Implementasi strategi dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan, dan koordinasi, tetapi belum optimal karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan pemerataan pembinaan. Evaluasi strategi dilakukan melalui monitoring dan rapat evaluasi, namun belum menggunakan indikator kinerja yang terukur. Secara keseluruhan, strategi penguatan kapasitas SDM KIM telah menerapkan tahapan manajemen strategi Fred R. David, tetapi masih memerlukan penguatan agar mampu mendukung transformasi digital secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi, Kapasitas SDM, Transformasi Digital.

Abstract

This study aims to analyze the strategy for strengthening the human resource capacity of Community Information Groups (Kelompok Informasi Masyarakat/ KIM) at the Department of Communication and Informatics of Merauke Regency in supporting digital transformation. This research employed a descriptive qualitative research method. The study involved ten informants consisting of the Head of the Department, Division Head, Section Heads, Head of General Affairs and Personnel Subdivision, KIM leaders at the district and village levels, and community members as beneficiaries. Informants were selected using a purposive sampling technique based on their knowledge and direct involvement in the implementation of KIM programs. Data were collected through interviews, observations, and documentation, while data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the strategy formulation process has

been carried out through needs identification, goal setting, and the development of capacity-building programs; however, it has not yet been supported by a comprehensive digital capacity mapping. Strategy implementation has been conducted through digital literacy training, mentoring, and coordination activities, but has not been fully optimized due to budget limitations, inadequate infrastructure, and unequal distribution of coaching programs. Strategy evaluation has been undertaken through monitoring and evaluation meetings; however, it has not yet applied measurable performance indicators. Overall, the strategy for strengthening the human resource capacity of KIM has adopted the strategic management stages proposed by Fred R. David, but further improvements are required to effectively support sustainable digital transformation.

Keywords: Strategy, Human Resource Capacity, Digital Transformation.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan pemerintahan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi secara produktif. Dalam perspektif administrasi publik, transformasi digital menuntut adanya tata kelola komunikasi publik yang efektif, partisipatif, dan inklusif (Mergel, Edelmann, & Haug, 2019). Selain itu, konsep masyarakat informasi menekankan pentingnya literasi digital sebagai prasyarat utama dalam mendorong pembangunan berbasis pengetahuan (Castells, 2010).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menginisiasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang informasi. KIM berperan sebagai agen diseminasi informasi, pengelola informasi lokal, serta fasilitator komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Secara normatif, keberadaan KIM didukung oleh berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, yang menjadi dasar pembentukan dan pengelolaan KIM. Regulasi ini menempatkan KIM sebagai bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan literasi informasi dan memperkuat komunikasi publik di tingkat masyarakat.

Di Kabupaten Merauke, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu mitra strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung penyebaran informasi publik hingga ke tingkat kampung. KIM berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui penyampaian informasi mengenai program pembangunan, pelayanan publik, literasi digital, serta pemanfaatan teknologi informasi yang produktif. Selain itu, KIM juga diharapkan menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi potensi lokal, menyampaikan aspirasi, serta

mengembangkan informasi yang memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dalam wilayah Kabupaten Merauke yang memiliki karakteristik geografis luas dengan sebaran kampung yang berjauhan, keberadaan KIM menjadi penting sebagai ujung tombak diseminasi informasi publik dan penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sejauh ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke telah membentuk 23 (dua puluh tiga) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di berbagai distrik dan kampung. Kelompok tersebut antara lain KIM Maju Kampung Rahawayu Distrik Ulilin, KIM Sota Distrik Sota, serta KIM yang berada di Kampung Telaga Sari, Harapan Makmur, Kurik, Sumber Mulya, Jaya Makmur, Wapeko, Wonorejo, Kaliki, Anumbob, Sumber Rejeki, Ivimahad, Salor Indah, Candra Jaya, Yowid, Dokib, Wamal, Woboyo, Dodalim, Welbuti, Distrik Semangga, dan Distrik Merauke. Pembentukan KIM tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Merauke dalam memperluas akses informasi dan mendukung transformasi digital hingga ke tingkat kampung.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke Tahun 2026, dari 23 Kelompok Informasi Masyarakat yang telah dibentuk, hanya 3 (tiga) KIM atau sekitar 13,04 persen yang masih aktif menjalankan fungsi dan kegiatannya, sedangkan 20 (dua puluh) KIM atau sekitar 86,96 persen tergolong kurang aktif. KIM yang aktif secara rutin melaksanakan kegiatan diseminasi informasi, sosialisasi program pemerintah, dan pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi masyarakat. Sebaliknya, sebagian besar KIM yang kurang aktif belum mampu menjalankan fungsi kelembagaannya secara optimal, baik dalam penyebarluasan informasi, pengelolaan media komunikasi masyarakat, maupun pemberdayaan masyarakat berbasis informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pembentukan KIM telah dilakukan secara luas, efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaan KIM masih menghadapi berbagai kendala.

KIM diharapkan mampu menjadi motor penggerak literasi digital di tingkat lokal, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). KIM tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang mampu mengidentifikasi, mengolah, dan mendistribusikan informasi yang bernilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan KIM sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, meliputi kemampuan teknis, manajerial, serta pemahaman terhadap peran dan fungsi kelembagaan. Menurut Grindle (1997), penguatan kapasitas (*capacity building*) merupakan proses peningkatan kemampuan individu dan organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

Kondisi empiris di Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa implementasi KIM belum berjalan optimal. Berdasarkan fenomena di lapangan, masih banyak kelompok KIM yang belum memahami secara utuh alur kerja, tugas, dan fungsi KIM sebagai lembaga komunikasi sosial. Hal ini menyebabkan rendahnya aktivitas KIM dalam mengelola

dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Selain itu, sebagian besar masyarakat di tingkat kampung belum mengetahui keberadaan dan pentingnya KIM dalam mendukung literasi informasi dan pembangunan berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal KIM dengan realitas implementasinya di lapangan.

Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas SDM, minimnya pelatihan dan pendampingan, serta keterbatasan anggaran dalam mendukung operasional KIM. Selain itu, karakteristik geografis Kabupaten Merauke yang luas dengan sebaran kampung yang berjauhan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembinaan dan penguatan kelembagaan KIM. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua KIM aktif menjalankan programnya secara berkelanjutan, bahkan terdapat KIM yang hanya bersifat administratif tanpa aktivitas nyata di masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kontribusi KIM dalam mendukung transformasi digital di tingkat lokal.

Penelitian terdahulu terkait KIM umumnya berfokus pada aspek evaluasi program dan efektivitas implementasi kebijakan komunikasi publik. Misalnya, studi tentang evaluasi program KIM menunjukkan bahwa keberhasilan program sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Namun, penelitian tersebut cenderung belum secara mendalam mengkaji strategi penguatan kapasitas SDM sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kinerja KIM. Selain itu, kajian yang secara spesifik mengangkat konteks daerah 3T, seperti Kabupaten Merauke, masih sangat terbatas. Padahal, kondisi sosial, geografis, dan kultural di daerah 3T memerlukan pendekatan strategi yang berbeda dan lebih kontekstual. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam hal analisis strategi penguatan kapasitas SDM KIM yang adaptif terhadap kondisi lokal dan berorientasi pada transformasi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke dalam memperkuat kapasitas SDM KIM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait capacity building dan komunikasi pembangunan, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran KIM. Dengan strategi penguatan kapasitas yang tepat, KIM diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai agen transformasi digital di tingkat kampung, meningkatkan literasi informasi masyarakat, serta mendorong pembangunan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Strategi dalam Organisasi Publik

Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif. David menjelaskan strategi sebagai sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui keputusan dan tindakan yang terintegrasi. Sementara itu, Mintzberg memandang strategi secara lebih luas melalui konsep *5P*, yaitu *plan*, *ploy*, *pattern*, *position*, dan *perspective*. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa strategi tidak hanya berupa perencanaan formal, tetapi juga mencakup pola tindakan dan kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Dalam organisasi publik, strategi memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis karena berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat. Bryson menekankan bahwa strategi sektor publik merupakan proses untuk menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar yang membentuk serta mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan publik. Dengan demikian, strategi publik perlu mempertimbangkan lingkungan organisasi, keterbatasan sumber daya, kepentingan pemangku kepentingan, akuntabilitas, serta nilai publik. Dalam penelitian ini, strategi dipahami sebagai serangkaian upaya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program penguatan kapasitas SDM Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk mendukung pemanfaatan informasi dan teknologi digital di Kabupaten Merauke.

2. Penguatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Penguatan kapasitas merupakan proses peningkatan kemampuan individu, organisasi, dan sistem agar mampu menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah, serta mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Grindle memandang *capacity building* sebagai upaya peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan, sedangkan UNDP menempatkan kapasitas pada tiga tingkatan, yaitu individu, organisasi, dan lingkungan kelembagaan.

Dalam konteks organisasi publik, penguatan kapasitas tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, *capacity building* perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta penyediaan dukungan sumber daya.

Penelitian ini memfokuskan penguatan kapasitas pada kemampuan SDM KIM dalam mengelola, memproduksi, memverifikasi, dan menyebarluaskan informasi serta memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung kebutuhan masyarakat.

3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. Penguatan kapasitas SDM mencakup peningkatan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara

efektif.

Grindle membagi penguatan kapasitas ke dalam dimensi pengembangan individu, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Dalam perspektif *human capital*, investasi terhadap pendidikan dan pelatihan dipandang sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan produktivitas individu.

Dalam konteks KIM, penguatan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan literasi digital, bimbingan teknis pengelolaan informasi, pendampingan, pengembangan kemampuan komunikasi, serta peningkatan kemampuan menggunakan media digital. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas KIM sebagai pengelola dan penyebarluasan informasi di tingkat masyarakat.

4. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan kelompok masyarakat yang berperan dalam mengelola, memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. KIM dapat menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi.

Dalam perkembangan teknologi digital, peran KIM tidak lagi terbatas pada penyebaran informasi secara konvensional, tetapi berkembang pada pemanfaatan media sosial dan berbagai platform digital. Oleh karena itu, kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan KIM menjalankan fungsi informasi secara efektif.

KIM memiliki beberapa fungsi utama, antara lain penyebaran informasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi, pengembangan jejaring, dan pemanfaatan teknologi. Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan dukungan kapasitas SDM, kelembagaan, sarana teknologi, serta pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.

5. Kerangka Analisis Penelitian

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini menggunakan konsep strategi sebagai kerangka utama untuk menganalisis upaya Dinas Kominfo dalam memperkuat kapasitas SDM KIM. Analisis strategi mencakup tiga tahapan utama, yaitu **perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi**.

Pada tahap perumusan, penelitian mengidentifikasi bagaimana Dinas Kominfo memahami kebutuhan dan permasalahan KIM serta menyusun program penguatan kapasitas. Pada tahap implementasi, penelitian menganalisis pelaksanaan pelatihan, pendampingan, pembinaan, penyediaan sumber daya, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya, tahap evaluasi digunakan untuk melihat monitoring, pencapaian program, hambatan, serta upaya perbaikan.

Dengan demikian, hubungan antarkonsep dalam penelitian dapat dirumuskan bahwa **strategi** Dinas Kominfo melalui perumusan, implementasi, dan evaluasi program menjadi instrumen penguatan kapasitas SDM KIM. Penguatan tersebut diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi digital sehingga

KIM mampu menjalankan fungsi pengelolaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat secara lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam mendukung transformasi digital. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan strategi, bentuk pembinaan, peningkatan kompetensi, pendampingan, serta berbagai faktor yang memengaruhi penguatan kapasitas SDM KIM. Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke dan beberapa KIM di Kabupaten Merauke pada Maret–Mei 2026. Informan ditentukan secara purposive berdasarkan pengetahuan, keterlibatan, dan kewenangan terhadap pengelolaan serta pembinaan KIM. Informan berjumlah 10 orang, yang terdiri atas Kepala Dinas, pejabat struktural/pengelola bidang terkait, pengelola KIM, serta masyarakat. Apabila diperlukan, peneliti dapat mengembangkan informan melalui teknik *snowball sampling* sampai informasi yang diperoleh mencapai kejenuhan data. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan catatan lapangan dari informan yang terlibat dalam pengelolaan dan pembinaan KIM. Data sekunder diperoleh dari dokumen kelembagaan, Renstra, LAKIP, profil dan data KIM, laporan kegiatan pembinaan, peraturan terkait, serta literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai strategi pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM KIM, pelaksanaan program, kendala, serta upaya penguatan KIM dalam mendukung transformasi digital. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi dan aktivitas KIM serta proses pembinaan secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikondensasi dan dikategorikan berdasarkan tema penelitian, seperti strategi pembinaan, peningkatan kompetensi SDM, pendampingan, koordinasi, partisipasi KIM, pemanfaatan teknologi informasi, serta faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan antartema, dan makna temuan penelitian. Kesimpulan ditarik secara bertahap dan diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai strategi penguatan kapasitas SDM KIM di Kabupaten Merauke.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 10 informan yang terdiri atas unsur pimpinan dan pejabat teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke, pengurus KIM, serta masyarakat. Analisis penelitian menggunakan perspektif strategi Fred R. David yang meliputi perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

1. Perumusan Strategi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan strategi penguatan kapasitas SDM KIM dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, penyusunan program, serta pelibatan pengurus KIM. Dinas Komunikasi dan Informatika mempertimbangkan perkembangan kebutuhan informasi masyarakat, perkembangan teknologi digital, hasil monitoring, serta evaluasi kegiatan sebelumnya dalam menyusun program pembinaan. Program yang dirancang mencakup peningkatan literasi digital, pengelolaan media sosial, pembuatan konten informasi, komunikasi publik, serta penguatan kelembagaan KIM. Kepala Dinas menjelaskan bahwa KIM diarahkan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen literasi digital di masyarakat:

“KIM kami harapkan bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi mampu menjadi agen literasi digital yang membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat.”
(TK, 2026)

Temuan juga menunjukkan adanya upaya pemetaan kebutuhan karena kapasitas setiap KIM berbeda. Beberapa KIM membutuhkan penguatan kemampuan teknologi, sementara lainnya masih memerlukan penguatan kelembagaan dan pemahaman mengenai fungsi KIM. Pengurus KIM juga dilibatkan dalam menyampaikan kebutuhan sebelum program ditetapkan. Namun, perumusan strategi belum sepenuhnya menjangkau seluruh KIM secara merata. Keterbatasan anggaran dan perbedaan kondisi antarwilayah menjadi faktor yang memengaruhi penetapan prioritas program. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Fred R. David, tahap perumusan strategi telah mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, dan penyusunan alternatif program, tetapi masih memerlukan pemetaan kebutuhan yang lebih komprehensif dan partisipatif.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, antara lain pelatihan literasi digital, pengelolaan media sosial, penulisan berita, fotografi, videografi, pembuatan konten digital, sosialisasi, pendampingan, monitoring, dan forum koordinasi. Kegiatan tersebut diarahkan agar anggota KIM mampu memanfaatkan

teknologi informasi dan menjalankan fungsi sebagai penyebar informasi publik. Menurut salah satu pejabat teknis:

“Kami tidak hanya memberikan teori, tetapi peserta langsung praktik membuat konten digital, mengelola media sosial, dan memanfaatkan aplikasi yang dapat mendukung penyebaran informasi.” (AHS, 2026)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kemampuan anggota KIM. Anggota KIM mulai mampu membuat berita, foto, video, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi. Masyarakat juga merasakan manfaat melalui akses informasi pembangunan yang lebih cepat. Meskipun demikian, implementasi strategi belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, frekuensi pembinaan yang masih terbatas, belum meratanya kesempatan mengikuti pelatihan, keterbatasan perangkat teknologi, kualitas jaringan internet, serta belum optimalnya pendampingan pascapelatihan. Salah satu pengurus KIM menyampaikan:

“Kalau hanya sekali dalam setahun, kemampuan yang diperoleh kadang tidak berkembang karena teknologi berubah sangat cepat.” (K, 2026)

Implementasi juga menunjukkan adanya kerja sama dengan pemerintah kampung, pemerintah distrik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas KIM membutuhkan dukungan lintas sektor dan tidak dapat hanya bergantung pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam perspektif Fred R. David, implementasi strategi telah diwujudkan melalui pelaksanaan program, pemanfaatan sumber daya, koordinasi, dan kemitraan. Namun, keterbatasan sumber daya menyebabkan pelaksanaan belum merata dan belum sepenuhnya berkelanjutan.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi dilakukan melalui rapat evaluasi, laporan kegiatan, monitoring lapangan, komunikasi dengan pengurus KIM, serta pengumpulan masukan dari peserta. Evaluasi digunakan untuk mengetahui capaian program, mengidentifikasi hambatan, dan menjadi bahan penyusunan program pembinaan berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan anggota KIM dalam menggunakan teknologi informasi, mengelola media sosial, membuat konten, dan menyebarluaskan informasi publik. Masyarakat juga mengakui adanya peningkatan kemudahan dalam memperoleh informasi pembangunan melalui aktivitas KIM. Namun, evaluasi juga menunjukkan bahwa hasil pembinaan belum merata. Sebagian KIM mampu menjalankan aktivitas secara aktif, sedangkan sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan. Selain itu, beberapa rekomendasi hasil evaluasi, seperti peningkatan frekuensi pelatihan dan penyediaan

perangkat pendukung, belum seluruhnya dapat direalisasikan karena keterbatasan sumber daya. Salah satu pengurus KIM menyatakan:

“Kami sudah menyampaikan beberapa kebutuhan, seperti pelatihan lanjutan dan bantuan peralatan, tetapi belum semuanya dapat direalisasikan.” (P, 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi telah berjalan, tetapi tindak lanjut hasil evaluasi masih menjadi persoalan. Dalam perspektif Fred R. David, evaluasi strategi tidak hanya berkaitan dengan pengukuran kinerja, tetapi juga tindakan korektif. Oleh karena itu, efektivitas evaluasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi menindaklanjuti hasil evaluasi ke dalam program dan pengalokasian sumber daya pada periode berikutnya.

4. Sintesis Strategi Penguatan Kapasitas SDM KIM

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan kapasitas SDM KIM di Kabupaten Merauke telah dilaksanakan melalui tiga tahapan manajemen strategi Fred R. David, yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Berikut Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Strategi Manajemen

Tahapan Strategi	Temuan Utama	Permasalahan
Perumusan	Identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, penyusunan program, dan pelibatan KIM	Pemetaan kebutuhan belum merata dan keterbatasan anggaran
Implementasi	Pelatihan literasi digital, media sosial, konten, pendampingan, monitoring, dan koordinasi	Frekuensi pembinaan terbatas, fasilitas dan jaringan belum memadai
Evaluasi	Evaluasi melalui laporan, monitoring, rapat, dan masukan KIM	Tindak lanjut hasil evaluasi belum optimal

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa strategi Dinas Komunikasi dan Informatika telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas SDM KIM dan akses informasi masyarakat. Namun, efektivitas strategi masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, ketimpangan kapasitas antar-KIM, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum berkelanjutannya pendampingan. Dengan demikian, penguatan kapasitas SDM KIM tidak cukup dilakukan melalui pelatihan sesaat, tetapi membutuhkan strategi yang berkelanjutan melalui pemetaan kebutuhan, pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan pascapelatihan, penyediaan sarana digital, monitoring berkala, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Pendekatan tersebut penting agar KIM tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi berkembang menjadi aktor masyarakat yang mampu mengelola dan

menyebarkan informasi secara efektif dalam proses transformasi digital.

PEMBAHASAN

1. Perumusan Strategi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan strategi penguatan kapasitas SDM Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, penyusunan program, dan pelibatan pengurus KIM. Strategi diarahkan pada peningkatan literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi informasi, pengelolaan media sosial, komunikasi publik, serta produksi konten digital. Temuan tersebut sejalan dengan konsep *strategy formulation* Fred R. David (2017), yang menempatkan analisis kondisi internal dan eksternal, penetapan tujuan, serta pemilihan strategi sebagai bagian penting dalam perumusan strategi. Identifikasi perbedaan kemampuan antar-KIM menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika telah mempertimbangkan kondisi internal, sementara perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi menjadi faktor eksternal yang memengaruhi arah strategi.

Jika dikaitkan dengan konsep *capacity building* Grindle (1997), strategi yang dirumuskan telah menyentuh kapasitas individu melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital serta kapasitas organisasi melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi KIM. Namun, kapasitas pada tingkat sistem masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana teknologi, dan pemerataan pembinaan. Dari perspektif pengembangan SDM, strategi tersebut telah mengarah pada peningkatan kompetensi yang relevan dengan transformasi digital. Akan tetapi, pembinaan masih cenderung berbasis kegiatan pelatihan dan belum sepenuhnya menjadi proses pembelajaran berkelanjutan. Karena itu, perumusan strategi perlu diperkuat melalui pemetaan kapasitas digital setiap KIM, basis data kompetensi, penetapan indikator kinerja, serta *roadmap* pengembangan KIM.

Dengan demikian, perumusan strategi telah memiliki arah yang sesuai dengan kebutuhan transformasi digital, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pemetaan kebutuhan, keberlanjutan program, dan dukungan sistem agar strategi tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga membangun KIM sebagai kelembagaan masyarakat yang adaptif.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi diwujudkan melalui pelatihan literasi digital, pengelolaan media sosial, penulisan berita, fotografi, videografi, pembuatan konten, pendampingan, monitoring, sosialisasi, dan forum koordinasi. Program tersebut menunjukkan bahwa strategi yang

dirumuskan telah diterjemahkan ke dalam kegiatan operasional yang meningkatkan kemampuan anggota KIM dalam mengelola dan menyebarkan informasi publik.

Temuan ini sesuai dengan konsep *strategy implementation* Fred R. David (2017), yang menekankan penerjemahan strategi ke dalam program, pengalokasian sumber daya, koordinasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam penelitian ini, implementasi telah didukung oleh koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pengurus KIM serta kerja sama dengan pemerintah kampung, distrik, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, frekuensi pembinaan yang belum memadai, belum meratanya kesempatan mengikuti pelatihan, keterbatasan perangkat teknologi, jaringan internet, dan pendampingan pascapelatihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas individu belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas organisasi dan sistem yang memadai.

Dalam perspektif Grindle (1997), implementasi telah meningkatkan kapasitas individu dan organisasi, tetapi penguatan kapasitas sistem masih perlu diperbaiki. Sementara itu, dari perspektif pengembangan SDM, pembinaan perlu diarahkan pada *continuous learning* melalui pendampingan dan pembelajaran berkelanjutan, bukan hanya pelatihan periodik. Dengan demikian, implementasi strategi telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi digital anggota KIM dan akses informasi masyarakat, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya. Penguatan kemitraan, pendampingan berkelanjutan, pemerataan program, dan penyediaan sarana digital menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan keberlanjutan implementasi strategi.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi dilakukan melalui monitoring, laporan kegiatan, rapat evaluasi, komunikasi dengan pengurus KIM, serta penilaian perkembangan KIM setelah mengikuti pembinaan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan anggota KIM dalam memanfaatkan teknologi, mengelola media sosial, membuat konten, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *strategy evaluation* Fred R. David (2017), yang meliputi pengukuran kinerja, peninjauan kembali faktor strategis, dan tindakan korektif. Evaluasi telah digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki materi dan metode pembinaan pada periode berikutnya. Namun, sistem evaluasi masih lebih banyak berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dibandingkan pengukuran hasil dan dampak. Evaluasi belum sepenuhnya menggunakan indikator yang terukur untuk mengetahui perubahan tingkat kompetensi digital, produktivitas konten, aktivitas media sosial, jangkauan informasi, maupun kontribusi KIM terhadap pelayanan informasi publik.

Dalam perspektif *capacity building* Grindle (1997), kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kapasitas individu dan organisasi telah dilakukan, tetapi evaluasi pada tingkat sistem masih perlu diperkuat. Demikian pula dalam perspektif pengembangan SDM, evaluasi perlu mengukur tidak hanya pengetahuan yang diperoleh setelah pelatihan, tetapi juga penerapan keterampilan dan perubahan perilaku dalam aktivitas KIM.

Oleh karena itu, evaluasi strategi perlu dikembangkan melalui indikator kinerja yang terukur, basis data perkembangan KIM, monitoring berbasis digital, pemetaan tingkat kematangan digital, dan mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi yang demikian akan menjadikan proses evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi sebagai instrumen *continuous improvement* bagi pengembangan KIM.

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut, strategi penguatan kapasitas SDM KIM di Kabupaten Merauke telah berjalan melalui siklus perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Perumusan telah mempertimbangkan kebutuhan KIM dan perkembangan transformasi digital; implementasi telah diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan, koordinasi, dan kerja sama; sedangkan evaluasi telah dilakukan melalui monitoring dan umpan balik untuk perbaikan program. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut evaluasi. Kesenjangan tersebut terutama dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, belum meratanya kapasitas antar-KIM, keterbatasan infrastruktur digital, serta belum berkelanjutannya sistem pendampingan dan evaluasi.

Dengan demikian, penguatan kapasitas SDM KIM perlu diarahkan dari pendekatan berbasis pelatihan (*training-based*) menuju pengembangan kapasitas yang berkelanjutan (*sustainable capacity building*). Strategi tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan kapasitas digital, pelatihan berbasis kebutuhan, pendampingan pascapelatihan, penyediaan sarana digital, penguatan kolaborasi multipihak, serta evaluasi berbasis indikator kinerja. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat KIM sebagai mitra pemerintah sekaligus agen literasi digital dan komunikasi publik di masyarakat Kabupaten Merauke.

KESIMPULAN

Bahwa strategi yang diterapkan pada dasarnya telah mengacu pada tiga tahapan manajemen strategi menurut Fred R. David, yaitu perumusan strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), dan evaluasi strategi (*strategy evaluation*). Pada tahap perumusan strategi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke telah melakukan identifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan strategis, menyusun program pembinaan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Implementasi strategi telah diwujudkan melalui berbagai program pembinaan, seperti pelatihan, pendampingan, monitoring, dan koordinasi yang mampu meningkatkan kompetensi digital anggota KIM. Namun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal

karena masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, belum meratanya pembinaan pada seluruh KIM, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum adanya sistem pendampingan yang berkelanjutan. Evaluasi strategi di Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebagai dasar penyempurnaan kegiatan berikutnya. Akan tetapi, evaluasi yang dilakukan masih lebih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dan belum sepenuhnya menggunakan indikator kinerja yang terukur untuk menilai efektivitas strategi maupun tingkat kematangan digital KIM.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, B. B. (2024). *Transformasi administrasi publik digital dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Indonesia*. NAPAS Proceedings.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Armstrong, M. (2020). *Armstrong's handbook of human resource management practice* (15th ed.). Kogan Page.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke. (2025). *Kabupaten Merauke dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Merauke.
- David, F. R. (2017). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases* (16th ed.). Pearson Education.
- Dessler, G. (2021). *Human resource management* (16th ed.). Pearson Education.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke. (2025). *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke Tahun 2021–2026*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development.
- Grindle, M. S. (2004). *Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries*. Harvard University Press.
- Handoko, T. H. (2017). *Manajemen sumber daya manusia* (2nd ed.). BPFE Yogyakarta.
- Husna, S. N., & Ayuh, E. T. (2025). Studi tentang strategi komunikasi publik Kominfo Kota Bengkulu dalam mendorong literasi di masa transformasi digital. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1074>
- Isma, Y. S., & Kardiati, D. (2025). Transformasi digital sebagai instrumen untuk memperluas aksesibilitas layanan publik. *Journal of Administrative and Social Science (JASS)*.

- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2024). *Indeks Literasi Digital Indonesia 2024*. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). *Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024*. Kementerian PANRB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Kementerian PANRB.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mintzberg, H. (1994). *The rise and fall of strategic planning*. Free Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- Morgan, P. (2006). *The concept of capacity*. European Centre for Development Policy Management.
- Muliyanti, E., & Rosmilawati, S. (2025). Strategy of the Department of Communication, Informatics, Copyright and Statistics of Central Kalteng Province in developing the Information Community (KIM). *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET)*.
- Noora Fithriana, S. K. B., & Firman, F. (2024). Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "Nukus" dalam mewujudkan partisipasi publik pada Kelurahan Sukun Kota Malang.
- Nur Jalal, S. H. E., & Syahrudin. (2025). Optimalisasi peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam literasi digital di Kabupaten Merauke. *PJHP: Papsel Journal of Humanities and Policy*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government*. OECD Publishing.
- Rikardus, E. (2025). Digital-governance dan efektivitas pelayanan publik di desa perbatasan: Studi kasus Kabupaten Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sumiasih, A. F. A., Nur Jalal, S., & Syahrudin. (2025). Evaluasi program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke.
- United Nations. (2022). *E-Government survey 2022: The future of digital government*. United Nations.

- United Nations Development Programme. (2009). *Capacity development: A UNDP primer*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2016). *World development report 2016: Digital dividends*. World Bank.